

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan perekonomian bisa dianggap sebagai gambaran kehidupan di sebuah negara karena menjadi penentu arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa fondasi ekonomi yang kokoh, suatu negara akan mengalami kesulitan untuk berkompetisi di tingkat global. Menurut Mankiw (2007), peningkatan ekonomi merupakan suatu proses dimana kemampuan sebuah negara dalam menghasilkan barang dan jasa terus mengalami peningkatan secara berkesinambungan. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti bertambahnya jumlah modal, meningkatnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja, serta adanya perkembangan teknologi yang semakin maju.

Dalam perekonomian dunia, pola pemulihan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang seringkali memperlihatkan kesenjangan yang cukup nyata. Fenomena ini dapat diamati secara global melalui sejumlah indikator, seperti produktivitas, pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, serta akses terhadap sumber daya dan teknologi (Hasnah & Aisyah, 2025). Perekonomian dunia mengalami gejolak signifikan sejak awal 2020 akibat pandemi yang menyebabkan kontraksi PDB global menjadi sekitar -3 % pada kuartal pertama tahun tersebut (World Bank, 2020).

Dalam laporan IMF (2021) mencatat bahwa PDB negara maju mulai pulih kembali dengan rata-rata 3,5 % pada 2021, sedangkan negara-negara berkembang mengalami pertumbuhan lebih lambat sekitar 2,0 %, dipengaruhi oleh tingkat

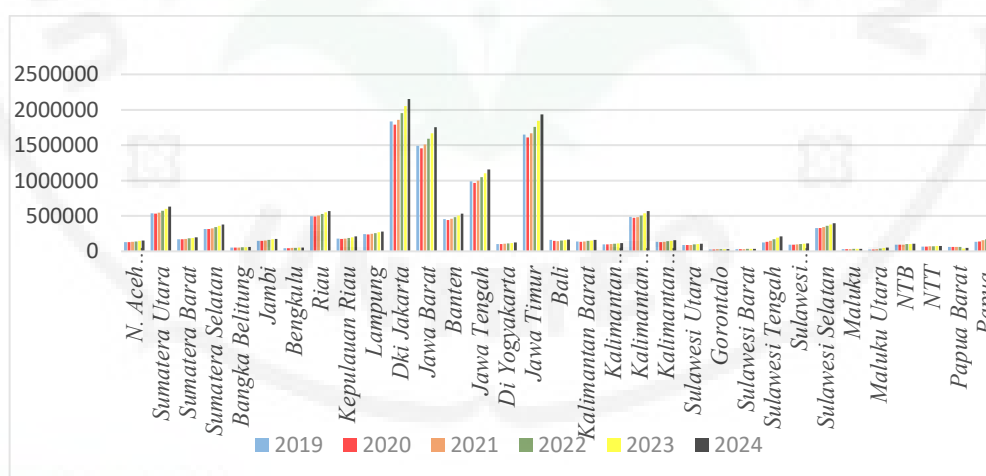
vaksinasi yang berbeda dan ketergantungan pada ekspor komoditas. Selain faktor kesehatan, faktor struktural seperti produktivitas, inovasi teknologi, dan reformasi kebijakan menjadi pendorong utama pemulihan pasca-pandemi.

Meskipun demikian, tren pemulihan ekonomi global kembali dihadapkan pada berbagai tantangan. Pada tahun 2024, perekonomian dunia mengalami perlambatan yang ditunjukkan oleh menurunnya Produk Domestik Bruto dari angka 3,2 persen di tahun 2023 menjadi 2,9 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kebijakan moneter yang semakin ketat serta berkurangnya dukungan fiskal di negara-negara maju, yang berpotensi menekan aktivitas ekonomi secara global (PwC, 14 Juni 2024).

Di Indonesia, arah pembangunan bangsa telah dijabarkan dalam Visi Indonesia 2045 yang menjadi pedoman menuju status negara maju saat peringatan 100 tahun kemerdekaan. Namun, upaya mencapai visi tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui (CNBC, 05 Februari 2020), Produk Domestik Bruto Indonesia pada 2019 tercatat hanya tumbuh sebesar 5,02 persen, termasuk sebagai angka terendah pada jangka waktu tiga tahun terakhir sekaligus menandai awal terjadinya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyebab utamanya adalah tekanan global dari konflik perdagangan di Amerika Serikat dan Tiongkok yang berakibat pada perlambatan aktivitas di perdagangan global. Di samping itu, pengeluaran konsumsi domestik yang selama ini berperan sebagai penopang utama terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pada kuartal terakhir tahun 2019 turut mengalami

penurunan, yang terlihat dari tingkat inflasi yang menunjukkan kecenderungan melambat.

Selanjutnya pada tingkat regional, perekonomian dapat dinilai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil atau harga konstan (Mankiw, 2007). Berdasarkan Todaro & Smith (2020), hal ini berfungsi untuk mengetahui keseluruhan nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah dengan kurun waktu tertentu. Perkembangan PDRB pada harga konstan (PDRB-hk) secara spesifik memastikan bahwa pertumbuhan yang diukur benar-benar mencerminkan peningkatan volume barang dan jasa (pertumbuhan riil), bukan sekadar kenaikan harga (inflasi).



Sumber : BPS

Gambar 1. 1 PDRB-hk di 33 Provinsi Indonesia (Milyar)

Dilihat dari Gambar 1.1, pertumbuhan PDRB-hk di 33 provinsi Indonesia menunjukkan fluktuasi dan perlambatan hingga 2024. Terlihat juga adanya kesenjangan pada provinsi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa memiliki PDRB-hk lebih tinggi karena didominasi sektor industri dan jasa, sedangkan luar Jawa bergantung pada sektor primer seperti pertambangan dan

pariwisata. Namun terjadi perlambatan pertumbuhan PDRB-hk dikarenakan adanya penurunan paling tajam pada tahun 2020 akibat pandemi dan kebijakan pembatasan kegiatan sosial yang berskala besar (PSBB) yang diberlakukan pada seluruh daerah Indonesia. Dimana DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional mencatat penurunan dari Rp1.836 triliun pada 2019 menjadi Rp1.792 triliun pada 2020 akibat berkurangnya aktivitas perkantoran dan perdagangan kemudian meningkat sebesar Rp2.151 triliun pada 2024. Sementara itu, Bali mengalami kontraksi terbesar dari Rp162 triliun ditahun 2019 menjadi Rp147 triliun pada 2020 karena pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonominya berhenti total selama pandemi kemudian hanya meningkat menjadi Rp168 triliun pada 2024.

Namun, setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, PDRB-hk di Indonesia mulai tumbuh kembali dengan didorong oleh sektor keuangan yang muncul sebagai alternatif di tengah guncangan yang terjadi. Hal ini didukung oleh data BI (2024) yang menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan mencapai 12,36% terutama didorong oleh kredit produktif, yaitu kredit (pinjaman) investasi (KI) serta kredit (pinjaman) konsumsi (KK) yang juga memperlihatkan pertumbuhan signifikan. Fakta ini mengindikasikan adanya fokus pada aktivitas produktif dan konsumtif dimana pengeluaran untuk makanan halal global mencapai lebih dari Rp 22.000 triliun (OJK, 2023).

Secara global, sektor keuangan konvensional yang berlandaskan bunga (interest) telah menunjukkan berbagai kelemahan mendasar, seperti ketidakstabilan finansial, ketimpangan pendapatan yang lebar, dan krisis yang berulang. Ketidakmampuan sistem ini dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dan

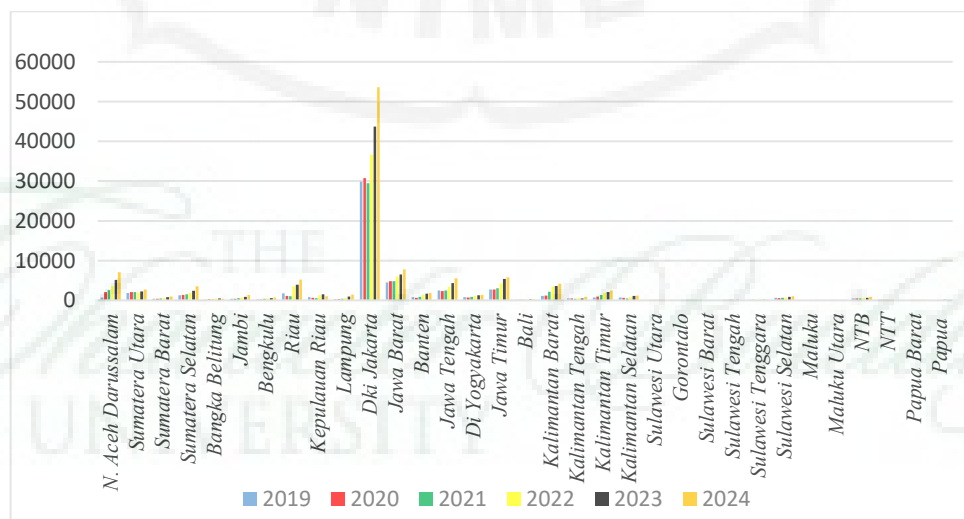
pertumbuhan yang inklusif mendorong pencarian alternatif sistem ekonomi yang lebih adil (Affandi *et al.*, 2023). Salah satu sistem ekonomi yang muncul sebagai paradigma alternatif yaitu sistem keuangan berbasis syariah. Dimana sistem keuangan syariah menawarkan solusi berbasis keadilan, bagi hasil (*profit-loss sharing*), dan keterlibatan kuat antara sektor industri keuangan dengan sektor riil (Fazri *et al.*, 2023).

Sistem keuangan syariah menyediakan beragam produk yang selaras dengan prinsip-prinsip islam, salah satunya yaitu pembiayaan (K & Maharani, 2024). Menurut Anrianto *et al* (2019) dalam buku Manajemen Bank, pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi sarana utama untuk menggerakkan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Melalui pembiayaan, lembaga keuangan memberikan dana ke sektor-sektor yang membutuhkan modal, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar. Dalam sistem keuangan syariah, pembiayaan tidak semata-mata berfokus pada perolehan keuntungan, tetapi juga menekankan penerapan prinsip keadilan, kemitraan, serta keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil.

Secara umum, perbedaan antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional terletak pada mekanisme yang digunakan, di mana pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil, sedangkan pembiayaan konvensional mengacu pada sistem bunga, yang dalam praktik keuangan konvensional penyaluran modal tersebut dikenal sebagai kredit (Adriyani *et al.*, 2024). Dalam konteks ini, pembiayaan syariah dapat diklasifikasikan menjadi dua pembiayaan yaitu produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif, seperti pembiayaan investasi

berbasis syariah, secara langsung berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi nasional serta menciptakan peluang kerja baru, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Sementara itu, pembiayaan konsumtif syariah berfungsi memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga kestabilan permintaan agregat di pasar (Arwendi & Himmati, 2024).

Tren global saat ini berdampak langsung pada perekonomian Indonesia khususnya di 33 provinsi, di mana terjadi perubahan penting pada tahun 2024 untuk pertama kalinya, pembiayaan investasi syariah di dalam negeri melebihi pembiayaan modal kerja (Ojk, 2024). Fakta ini menegaskan bahwa perbankan syariah Indonesia kini semakin fokus pada produk pembiayaan jangka panjang untuk membangun usaha dan industri, tidak hanya sekadar membiayai kebutuhan operasional jangka pendek. Pembiayaan investasi syariah berfungsi sebagai pendorong peningkatan kapasitas produksi karena dana dialirkan ke sektor-sektor yang bersifat produktif.



Sumber : OJK

Gambar 1. 2 Pembiayaan Investasi Syariah di 33 Provinsi Indonesia (Milyar)

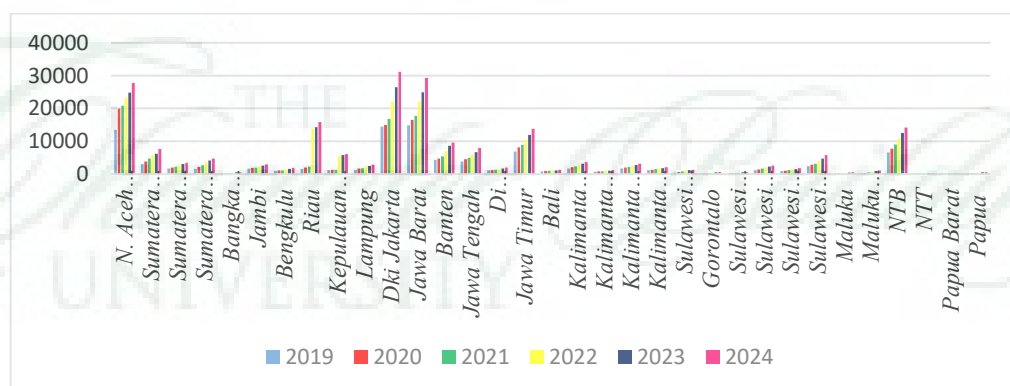
Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa pembiayaan investasi syariah di 33 provinsi Indonesia mengalami peningkatan signifikan pasca pandemi seiring dengan pemulihan ekonomi tahun 2022 sampai 2024, hal ini menegaskan perannya dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dimana terlihat Aceh melonjak dari Rp691 miliar di tahun 2019 naik menjadi Rp7,11 triliun di 2024, hal ini terjadi karena modal dari pembiayaan syariah mendorong kebangkitan sektor pertanian dan UMKM yang menjadi penopang ekonomi lokal. DKI Jakarta juga mengalami hal serupa dimana pada 2019 sebesar Rp29 triliun mengalami peningkatan hingga 2024 menjadi Rp53 triliun. Hal ini dikarenakan pembiayaan syariah memperkuat sektor keuangan, bisnis, dan jasa modern, karena modal dialokasikan untuk ekspansi usaha yang nyata dan produktif.

Kenaikan ini mencerminkan semakin kuatnya penerapan ekonomi syariah di berbagai daerah di Indonesia. Peningkatan pembiayaan investasi syariah di sejumlah provinsi menandakan bahwa sektor keuangan syariah mempunyai kontribusi yang semakin signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional. Namun, meskipun tren secara umum positif, pertumbuhan investasi syariah di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah, di mana provinsi-provinsi besar mengalami percepatan tinggi, sementara daerah lain berkembang secara lebih bertahap.

Selain aktivitas produktif, tingkat konsumtif juga menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan PDRB. Dari perspektif ekonomi syariah, pembiayaan konsumsi syariah meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kebutuhan konsumsi dapat terpenuhi. Artinya, pembiayaan konsumtif merupakan

pendanaan yang secara khusus diberikan untuk menunjang keperluan pribadi, bukan untuk kegiatan usaha. Pembiayaan ini umumnya diberikan kepada individu untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti pembelian barang konsumsi, rumah, kendaraan, atau kebutuhan lainnya. Berbeda dengan pembiayaan produktif yang memiliki tujuan mendorong peningkatan pendapatan atau mendukung aktivitas ekonomi, pembiayaan konsumtif lebih berfokus pada kenyamanan dan kesejahteraan individu (Afkar, 2014).

Pengeluaran masyarakat muslim terbesar berasal dari sektor makanan halal menurut OJK (2023) dan mengalami kenaikan sebesar 9,6% pada tahun 2022, dari sekitar USD 1,28 triliun atau setara dengan Rp19.840 triliun pada tahun 2021 menjadi USD 1,4 triliun sekitar Rp21.700 triliun pada tahun 2022. Pergerakan positif ini diperkirakan akan terus terjadi hingga tahun 2027, di mana diperkirakan menjadi USD 1,89 triliun atau sekitar Rp 29.295 triliun. Peningkatan ini menunjukkan semakin besarnya permintaan terhadap produk halal, terutama di sektor makanan, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk mengonsumsi produk sesuai dengan ketentuan agama.



Sumber : OJK

Gambar 1. 3 Pembiayaan Konsumsi Syariah di 33 Provinsi Indonesia (Milyar)

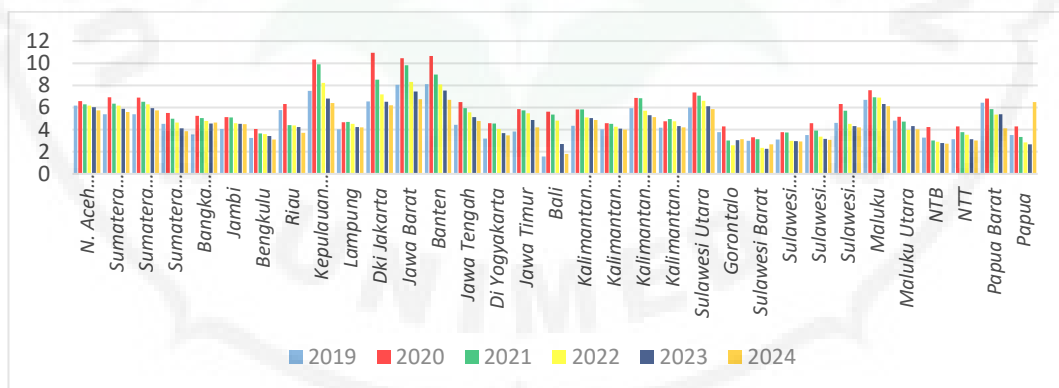
Berdasarkan Gambar 1.3, pembiayaan konsumtif syariah meningkat seiring pulihnya ekonomi nasional, dengan hampir seluruh provinsi mencatat kenaikan signifikan dan lebih merata dibanding pembiayaan investasi. Pembiayaan konsumsi syariah menunjukkan variasi yang berbeda antarprovinsi, yang disebabkan oleh struktur ekonomi dan tingkat aktivitas masyarakatnya. Ini tercermin dari kenaikan di DKI Jakarta dari Rp14 triliun pada 2019 menjadi Rp31 triliun pada 2024, didorong oleh tingginya tingkat urbanisasi, dominasi sektor industri dan jasa, serta daya beli masyarakat perkotaan yang relatif kuat. Sementara itu, di wilayah luar Jawa seperti Nusa Tenggara Barat, pembiayaan konsumsi syariah juga memperlihatkan kenaikan dari Rp6 triliun di 2019 menjadi Rp14 triliun pada 2024, namun nilainya masih lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta. Kondisi ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor pariwisata dan UMKM, keterbatasan infrastruktur, serta tingkat pendapatan masyarakat yang relatif lebih rendah, sehingga permintaan pembiayaan konsumsi syariah belum setinggi di wilayah Jawa.

Meskipun data menunjukkan bahwa pembiayaan investasi dan konsumsi syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di berbagai provinsi selama periode 2019 hingga 2024, namun fenomena ini tidak selalu diikuti oleh peningkatan PDRB. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kenaikan pembiayaan syariah pada sektor investasi dan konsumsi tidak selamanya berbanding lurus dengan pertumbuhan perekonomian. Sehingga fenomena tersebut menjadi objek studi yang menarik untuk dikaji.

Ternyata selain permasalahan di atas ada permasalahan pendukung lainnya, dimana penelitian oleh Wardani & Putra (2022) mengatakan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi. Namun penelitian oleh Moridu *et al* (2022) mengatakan hal sebaliknya dimana pembiayaan syariah ternyata berpengaruh negatif terhadap peningkatan ekonomi. Riset gap ini menjadi alasan untuk mengkaji lebih lanjut tentang pembiayaan syariah terutama di instrumen yang sedang berkembang saat ini tentang pembiayaan investasi dan konsumsi syariah karena hal ini belum banyak diteliti.

Untuk membuktikan efektivitas dari pembiayaan syariah meliputi pembiayaan investasi dan konsumsi syariah diperlukan variabel makro yang mendukung dampak dari pembiayaan tersebut. Tingkat pengangguran merupakan indikator makroekonomi yang dinilai dapat mempengaruhi efektivitas pembiayaan syariah dalam mendorong peningkatan PDRB karena dapat melemahkan kemampuan dalam memanfaatkan dan memenuhi kewajiban pembiayaan syariah (Thoyyibah & Amir, 2024). Menurut teori konsumsi siklus hidup, meningkatnya pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan sehingga pola konsumsi masyarakat tidak lagi stabil sepanjang siklus hidupnya karena mereka cenderung mengurangi konsumsi dan melakukan *dissaving* pada periode pendapatan rendah. Kondisi ini mengakibatkan tingkat konsumsi agregat melemah, sehingga daya dorong investasi yang bergantung pada stabilnya permintaan dan konsumsi masyarakat menjadi kurang optimal dalam mendorong peningkatan produksi (Mufida & Nasir, 2023).

Dalam konteks Indonesia, studi Farhan & Dean Amry (2023) menemukan bahwa setiap kenaikan pengangguran menurunkan efektivitas pembiayaan syariah terhadap PDB. Fenomena ini diperparah oleh masalah *skill mismatch* di pasar tenaga kerja, dimana pekerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri (Kemenaker, 2024). Data BPS (2024) menunjukkan provinsi dengan angka pengangguran lebih tinggi memiliki elastisitas pembiayaan syariah lebih rendah dibanding wilayah yang tingkat penganggurannya lebih kecil. Kondisi ini menciptakan paradoks dimana peningkatan pembiayaan syariah tidak selalu diikuti pertumbuhan ekonomi daerah yang optimal, terutama di sektor UMKM yang menyumbang 60% penyerapan tenaga kerja (OJK, 2023).



Sumber : BPS

Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di 33 Provinsi Indonesia (Persen)

Jika dilihat pada Gambar 1.4, terlihat TPT dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang menarik di berbagai provinsi di Indonesia. Beberapa wilayah seperti DKI Jakarta dan Banten menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif tinggi, namun dengan kecenderungan menurun setelah mengalami lonjakan pada tahun 2020. Pada tahun 2024, provinsi dengan TPT tertinggi yaitu Jawa Barat dengan nilai 6,75 persen. Tingginya tingkat pengangguran ini mencerminkan

ketatnya persaingan di pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk usia kerja, tingginya urbanisasi, serta masuknya pencari kerja dari berbagai daerah ke kawasan industri dan perkotaan. Sementara itu, provinsi dengan TPT terendah adalah Bali sebesar 1,79 persen. Rendahnya tingkat pengangguran di Bali menunjukkan kuatnya daya serap tenaga kerja pada sektor pariwisata dan jasa, terutama seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi yang mendorong meningkatnya peluang kerja baik di sektor formal maupun informal.

Fenomena ini menggambarkan bahwa meskipun kondisi ekonomi nasional mulai pulih pascapandemi, tingkat pengangguran belum sepenuhnya stabil di semua daerah. Secara umum, data ini menegaskan bahwa adanya kesenjangan antarprovinsi di lapangan dimana meskipun perekonomian Indonesia menunjukkan tren pemulihan, kesenjangan antarwilayah dalam hal kesempatan kerja masih cukup besar. Tingginya tingkat pengangguran di beberapa provinsi menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan pembiayaan produktif serta meningkatkan efektivitas investasi di sektor riil agar dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih merata.

Dalam penelitiannya, Hidayatullah *et al* (2023) mengemukakan bahwasannya tingkat pengangguran memiliki hubungan positif terhadap perekonomian. Namun disisi lain Ahmad (2024) menegaskan bahwasannya tingkat pengangguran memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Ini menguatkan alasan untuk melakukan kajian ulang tentang pengaruh tingkat pengangguran terhadap peningkatan ekonomi dengan menggabungkan pembiayaan syariah sebagai faktor pendorongnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini dilakukan guna memperkuat peran lembaga keuangan syariah dan memahami bagaimana keterkaitan antara pembiayaan syariah, baik dalam bentuk investasi maupun konsumsi yang terus meningkat, serta tingkat pengangguran yang masih tinggi di berbagai provinsi terhadap dinamika perekonomian di Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini diberi judul **"Pengaruh Pembiayaan Investasi Syariah, Pembiayaan Konsumsi Syariah dan Tingkat Pengangguran Terhadap PDRB di Indonesia."**

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada penjelasan-penjelasan di atas, adapun permasalahan yang ditemukan yaitu:

1. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan syariah terhadap perekonomian memperlihatkan adanya perbedaan (research gap). Beberapa studi menemukan pengaruh positif, namun tidak sedikit pula yang melaporkan pengaruh negatif. Perbedaan ini menegaskan bahwa efektivitas pembiayaan syariah dalam memacu produktivitas masih menjadi isu yang belum tuntas dan relevan untuk dikaji ulang.
2. Tingkat pengangguran di Indonesia juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi di beberapa provinsi, seperti DKI Jakarta dan Banten, mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan syariah belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang optimal.

3. Masih terdapat kesenjangan antarwilayah dalam efektivitas pembiayaan syariah terhadap peningkatan PDRB-hk. Wilayah Pulau Jawa cenderung lebih cepat merasakan dampak positif dari pembiayaan syariah dibandingkan dengan luar Jawa yang masih menghadapi berbagai hambatan struktural.
4. **Ketidaksesuaian antara peningkatan pembiayaan syariah dengan peningkatan PDRB-hk.** Meskipun pembiayaan investasi dan konsumsi syariah meningkat signifikan di berbagai provinsi (2019–2024), tidak semua wilayah mengalami peningkatan pertumbuhan PDRB-hk yang sejalan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar fokusnya lebih terarah dan tidak terlalu luas cakupannya, maka peneliti menetapkan beberapa batasan masalah, yaitu:

1. Penelitian ini membatasi pengukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada nilai riil (konstan) yang disajikan dengan bentuk miliar rupiah, dengan objek amatan sebanyak 33 provinsi di Indonesia untuk kurun waktu 2019–2024.
2. Pembiayaan Syariah diukur melalui pembiayaan investasi dan konsumsi syariah dengan bentuk ribuan dalam satuan miliar pada 33 Provinsi di Indonesia sesuai dengan jumlah Bank Syariah Di Indonesia dalam Periode 2019 sampai 2024.
3. Tingkat Pengangguran diukur melalui Tingkat pengangguran terbuka dalam satuan persen pada 33 Provinsi di Indonesia dalam Periode 2019 sampai 2024.

4. Data variabel yang digunakan hanya berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019 hingga 2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan investasi syariah berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan konsumsi syariah berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia?
3. Apakah Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia?
4. Apakah Pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumsi syariah dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia secara bersama-sama?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini dijabarkan seperti dibawah:

1. Mengetahui pengaruh pembiayaan investasi syariah terhadap PDRB di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh pembiayaan konsumsi syariah terhadap PDRB di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap PDRB di Indonesia.

4. Mengetahui pengaruh pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumsi syariah dan Tingkat pengangguran terhadap PDRB di Indonesia secara bersama-sama.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diberikan melalui penelitian ini, antara lain :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang berorientasi pada penguatan sektor keuangan syariah.

2. Bagi Peneliti

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman peneliti serta mengembangkan wawasan keilmuan mengenai pengaruh pembiayaan syariah dan tingkat pengangguran terhadap PDRB di Indonesia.

3. Bagi Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dan pelaku industri keuangan syariah adalah untuk memberikan informasi empiris mengenai sejauh mana pembiayaan syariah berkontribusi terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja.